



Nama Formulir:

**Lembar
Pengesahan
Karya Ilmiah**

No.

Dikosongkan *(diisi admin
prodi)

Issue/Revisi

1

Tgl Berlaku

-

Halaman

1

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Lengkap	Anton Aliabbas PhD
Jabatan	Dosen Program Magister Hubungan Internasional
Program Studi	Magister Hubungan Internasional
NIP	220006358

Telah melakukan penelaahan karya ilmiah berjudul:

KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA TERHADAP KONVENSI PERUBAHAN IKLIM DALAM
KESIAPANNYA MENGURANGI EMISI GAS RUMAH KACA PASCA 2020

Dan menyatakan bahwa karya ilmiah tersebut sudah memenuhi kaidah penulisan ilmiah dan oleh karenanya layak diajukan untuk keperluan unggah karya ilmiah di Universitas Paramadina, atas nama:

Nama Lengkap	Lovita Latifah Monoarfa
Jenjang	Magister Pascasarjana PGSD
Program Studi	Ilmu Hubungan Internasional
NIM	219131054

Demikian hasil penelaahan atas karya ilmiah ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Jakarta, 11 Juli 2023

Penelaah,

Dr. Anton Aliabbas

NIP: 220006358

KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA TERHADAP KONVENSİ PERUBAHAN IKLİM DALAM
KESIAPANNYA MENGURANGI EMISI GAS RUMAH KACA PASCA 2020

Graduate School Of Diplomacy
Universitas Paramadina
Lovita Latifah Monoarfa (219131054)
Loviymonoarfa@gmail.com

ABSTRAK

Perubahan iklim sudah sangat terasa saat ini, meskipun tidak semua negara menjadi sumber emisi gas rumah kaca yang terjadi, namun dampaknya bisa dirasakan diseluruh dunia. Indonesia sebagai Indonesia menyampaikan pernyataan bahwa sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki salah satu hutan tropis terbesar, dan menjadi negara kepulauan terbesar. Indonesia menyadari peran hutan dan laut dapat menjadi penyerap karbon dan manfaat lainnya yang bisa dinikmati oleh negara-negara lain. Indonesia menyerukan perlunya peningkatan kerjasama internasional khususnya dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Melalui konfrensi Perubahan iklim atau COP UNFCCC.

Keywords : Perubahan Iklim, Isu Laut, Konfrensi Paris Agreement, Mitigasi dan Sosialisasi.

ABSTRACT

Climate change is already being felt today, even though not all countries are the source of greenhouse gas emissions that occur, but its impact can be felt throughout the world. Indonesia conveys the statement that it is the largest archipelagic country in the world, has one of the largest tropical forests, and is the largest archipelagic country. Indonesia is aware of the role of forests and seas in being able to absorb carbon and other benefits that can be enjoyed by other countries. Indonesia calls for the need to increase international cooperation, especially in reducing greenhouse gas emissions. Through the Climate Change Conference, or UNFCCC COP.

Keywords : Climate Change, Marine Issues, the Paris Agreement Conference, mitigation, and Outreach.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar yang ada di dunia, memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perubahan iklim yang terjadi. Ekonomi, politik, keamanan dan lingkungan menjadi kaitan erat yang menjamin keharmonisan Indonesia dengan negara lain. Isu lingkungan menjadi pretek dalam politik internasional sejak berakhirnya perang dingin. Perubahan yang terjadi di dunia khususnya perubahan suhu, penyebab bencana, atau kerusakan hutan menjadi konsentrasi dunia yang diawali dengan penyelenggaraan *United Nations Conference on Environment and Development* atau *Earth Summit* pada tahun 1992 di Rio de Janeiro (Nurul Isnaeni & Broto Waardoyo, 2007-2008). Banyak kesepakatan yang dihasilkan dari proses panjang negosiasi dan kerjasama internasional di bidang lingkungan hidup dalam menyikapi dinamika isu tersebut dalam tingkat global. Perubahan iklim yang terjadi disebabkan oleh banyak faktor, namun dalam penelitian ini akan fokus kepada pengelolaan sumber daya laut sebagai proteksi dan rehabilitasi dalam ekosistem yang berdampak pada perubahan iklim. Laut memiliki potensi yang besar dalam berbagai aspek hubungan luar negeri Indonesia dengan negara lain.

Sejak november 2015 Indonesia telah menandatangani sebuah perjanjian Internasional yang tergabung dalam *Paris Agreement* yang menghasilkan *Draft Agreement*, *Draft Decision*, dan *Draft Decision on Workstream II*. Dalam konvensi ini Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon 29 persen, demi mencapai tujuan bersama, yakni menghentikan suhu pemanasan bumi agar tidak melebihi 2 derajat Celsius¹. Para pihak atau negara-negara yang terkait dalam konvensi ini juga sepakat mengakui bahwa perubahan iklim merupakan keprihatinan bersama umat manusia. Para Pihak perlu ketika mengambil aksi untuk menangani perubahan iklim, menghormati, mendorong dan mempertimbangkan tanggung-jawabnya terhadap hak asasi manusia, hak atas kesehatan, hak masyarakat hukum adat dan komunitas lokal, migran, anak-anak, penyandang disabilitas dan kelompok dalam kondisi rentan dan hak atas pembangunan termasuk kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan keadilan antar generasi. Mengakui pentingnya konservasi dan penguatan, secara patut, rosot dan penyimpanan gas rumah kaca yang diatur dalam Konvensi. Mencatat pentingnya

¹ <https://www.rappler.com/world/kesepakatan-final-cop-21-di-paris>. Diunduh 13 Dec 2015, Diakses 5 Nov 2020.

untuk menjamin integritas seluruh ekosistem, termasuk lautan, dan perlindungan keanekaragaman hayati, yang diakui oleh beberapa kebudayaan sebagai *Mother Earth*, dan mencatat pentingnya konsep “keadilan iklim”, ketika melakukan aksi penanganan perubahan iklim, menegaskan pentingnya pendidikan, pelatihan, pemahaman publik, partisipasi publik, akses publik atas informasi dan kerja sama di semua tingkatan dalam masalah yang diatur dalam persetujuan ini.²

Dalam konsep Hubungan Internasional, bergabungnya Indonesia dalam G20 sebagai satu-satunya negara dari Asia Tenggara memberikan dampak kekuatan yang cukup berpengaruh dalam bentuk Kerjasama Multilateral dengan Negara-Negara yang tergabung di dalamnya, dimana Negara-Negara tersebut mewakili 85% perekonomian dunia³. Peran Indonesia dalam setiap KTT G-20 senantiasa memajukan kepentingan negara berkembang dan menjaga terciptanya sistem perekonomian global yang inklusif dan berkelanjutan antara lain: usulan pembentukan global expenditure support fund, menghindari pembahasan *exit strategy* paket stimulus fiskal yang dapat merugikan negara berkembang, dan mendorong tercapainya konsensus selaku *bridge builder*.⁴

Konsentrasi Indonesia setelah tergabung dalam G20 tidak hanya berpusat pada peningkatan hubungan ekonomi saja, tetapi juga masalah-masalah lain yang pengaruhnya langsung dirasakan oleh masyarakat yang ada di dunia, salah satunya adalah perubahan iklim. Pada dekade terakhir, isu lingkungan mendapat perhatian luas masyarakat dalam studi keamanan. pemicunya adalah pemanasan global. Isu ini berkembang sejalan dengan perubahan paradigma keamanan yang sebelumnya berfokus ke negara menjadi bergeser pada manusia. Pemanasan global yang mengancam kelangsungan keamanan lingkungan dan hidup manusia telah mendorong kelompok-kelompok yang terlibat dalam masalah ini yang dalam konsep sekuritisasi lebih dikenal dengan sebutan *securitizing actors*, untuk mengagendakan langkah nyata. Mereka melakukan *securitizing move* dengan menggaungkan dampak bencana-bencana yang terjadi di luar kendali manusia (Trombetta, 2008:596). Kejadian-kejadian semacam ini memerlukan respon darurat yang pengambilan keputusannya dilakukan di luar mekanisme normal yang selama ini dijalankan.

² <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K7-26-99d0d68ca9b94161bbdc07fc0a17cc37.pdf>

³ Kompas.com - 27/04/2020, 08:00 WIB di akses 5 Nov 2020

⁴ <https://kemlu.go.id/portal/id>. Diunduh 23 Januari 2014, Diakses 5 Nov 2020.

Pada tahun 2015 pemerintah Indonesia ikut tegas dalam pengambilan kesepakatan *Paris Agreement* dan menjelaskan bahwa perubahan iklim yang menjadi kekhawatiran bersama ini harus menjadi konsentrasi dunia. Dengan adanya pertemuan COP 21 maka Indonesia memberikan dukungan politik terhadap suksesnya konvensi ini, dengan Indonesia memiliki kondisi geografis yang rentan terhadap perubahan iklim: Dua pertiga wilayah terdiri dari laut. Memiliki 17 ribu pulau, banyak di antaranya pulau-pulau kecil, 60 persen penduduk tinggal di pesisir, 80 persen bencana selalu terkait dengan perubahan iklim. Oleh karena itu Indonesia akan berkontribusi pada kelestarian laut dan pesisir demi memuhi kesepakatan dalam COP 21 yaitu pengurangan emisi gas bumi.

Ditahun 2020 Indonesia mematangkan bahan submisi untuk disampaikan kepada UNFCCC (*United Nations Framework Convention on Climate Change*) terkait isu laut yang mulai bergulir sejak pelaksanaan COP 25 (Blue COP) di Madrid, Spanyol tahun 2018. Dalam keputusannya, pihak Indonesia meminta kepada pimpinan SBSTA (*the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice*) untuk melakukan dialog tentang laut dan perubahan iklim pada pertemuan ke 52 yang berlangsung pada bulan Juni 2020, Dalam submisinya, Indonesia menekankan pentingnya pertukaran informasi, pengalaman dan praktek-praktek yang dapat diimplementasikan dengan baik untuk kepentingan resiliensi pada masyarakat pesisir sebagai kelompok masyarakat yang paling terkena dampak perubahan iklim.⁵

Selain itu, Indonesia juga menganggap pentingnya meningkatkan aksi-aksi yang berbasis pada ekosistem yang diintegrasikan pada pengelolaan laut dan pesisir. Memproteksi dan merehabilitasi ekosistem laut yang rentan terhadap perubahan iklim merupakan salah satu poin yang disampaikan pada submisi tersebut, termasuk bagaimana kerjasama dan penemuan-penemuan ilmiah dari kegiatan riset dan observasi dapat didiskusikan terutama untuk membantu negara-negara yang memiliki kapasitas terbatas baik dari sisi teknis dan sumberdaya. Submisi tersebut belum menekankan upaya mitigasi yang harus dilakukan untuk mengurangi dampak dari perubahan iklim. Pemerintah Indonesia menekankan untuk berbagai forum global (*Because the Ocean, Global Ocean Forum, High Level Panel for Sustainable Ocean Economy*) menekankan pentingnya fungsi laut sebagai bagian dari aksi mitigasi. Pemanfaatan

⁵ <https://www.mongabay.co.id/2020/04/13/isu-laut-dalam-konvensi-perubahan-iklim-dan-kesiapan-indonesia/> diakses 25 Oktober 2020.

energi terbarukan dari laut dan pengalihan bahan bakar untuk kapal-kapal yang berlayar dianggap sebagai upaya yang signifikan dalam pengurangan emisi.⁶

Kebijakan politik luar negeri Indonesia dalam menghadapi isu lingkungan ini menjadi krusial dikarenakan berkaitan dengan system ekonomi global bahkan keamanan yang sewaktu-waktu bisa menjadi ancaman bagi kepentingan nasional Indonesia.

KERANGKA PEMIKIRAN

Dalam penelitian ini, beberpa perspektif yang akan di bahas oleh peneliti adalah tentang gagasan yang relevan dengan pencegahan emisi gas rumah kaca yang menjadi salah satu sumber ancaman perubahan iklim yang ekstrem, Isu Laut dan Mitigasi dan Sosialisasi masyarakat terhadap perubahan iklim menjadi kerangka pemikiran untuk membangun artikel ini. Berikut hal-hal yang akan di bahas lebih lanjut.

a. Isu Laut

Laut di Indonesia menjadi sumber kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia, pentingnya menjaga sumber daya laut bukan hanya menjadi fokus pemerintah, melainkan seluruh masyarakat yang menikmati hasilnya. Dalam hal ini kelestarian laut menjadi fokus utama dalam penelitian ini, *human Insecurity* atau aktivitas ekonomi manusia bertambah sejalan dengan naiknya populasi. Kebutuhan yang seakan tak pernah cukup mendorong manusia untuk terus mengeksploitasi bumi dan meningkatkan aktivitas produksi. Ekonomi liberal yang membuka saluran perdagangan lintas batas negara turut melanggengkan aktivitas produksi industri yang berlebihan. Begitu juga dengan pola konsumsinya, perdagangan bebas dilakukan untuk mencari keuntungan maksimal dengan mendorong masyarakat untuk menjadi konsumtif. Aktifitas produksi juga cenderung dijalankan tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan. Ekonomi liberal gagal dalam menanggapi kenyataan bahwa pertumbuhan produksi dan konsumsi juga meningkatkan dampak buruk bagi lingkungan (Worku, 2007). Dengan meningkatnya hal tersebut tanpa memperhatikan akibat perubahan lingkungan yang terjadi maka perubahan iklim pun tidak dapat terhindarkan. Manusia yang hidup di bumi seakan-akan lupa bahwa selain memetik hasilnya, melestarikan kembali

⁶ Opini **Dr. Anastasia Rita Tisiana Dwi Kuswardani**, Peneliti Oseanografi Fisik di Badan Riset dan Sumber Daya Manusia, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam www.mongabay.co.id

lingkungannya juga menjadi kewajiban agar bumi bisa dinikmati dari generasi ke generasi. Hal ini menjadi identifikasi masalah dalam menentukan kebijakan *Green Political issue* yang tidak tersosialisasi di masyarakat, namun lahirnya kelompok-kelompok pencinta lingkungan dan juga di dukung oleh beberapa Organisasi Internasional diharapkan mampu memecahkan masalah tersebut.

Sebagai negara yang memiliki wilayah laut yang besar, energi dari pasang surut dan gelombang, dan konversi energi dari panas laut, merupakan potensi laut Indonesia yang cukup besar untuk dimanfaatkan sebagai energi terbarukan. Sayangnya, semua masih dalam tahap kajian. Dan jika pun ada, pemanfaatan energi dari laut itu belum dimanfaatkan secara optimal. Organisasi Maritim Internasional (IMO) telah mengeluarkan regulasi yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2020 yang bertujuan untuk secara signifikan mengurangi emisi SO_x dari 3,5% m/m (konten massa) sulfur konten sampai saat ini menjadi 0,5% m/m. Implementasi regulasi ini di Indonesia, kemudian juga diperkuat dengan dikeluarkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor 35 Tahun 2019 tanggal 18 Oktober 2019 tentang kewajiban penggunaan bahan bakar low sulfur dan larangan mengangkut atau membawa bahan bakar yang tidak memenuhi persyaratan serta pengelolaan limbah hasil resirkulasi gas buang dari kapal. Seberapa besar pengurangan emisi dari penerapan regulasi ini masih harus menunggu hasil implementasi ini sekitar 5-10 tahun mendatang. Meskipun laut terbuka atau laut lepas menampung banyak ekosistem dan organisme laut yang berfungsi sebagai penyerap karbon dalam jangka panjang, sampai sekarang sebagian besar perhatian masih tertuju pada peluang dari ekosistem pesisir kunci yaitu mangrove dan padang lamun.

Ekosistem pesisir ini memiliki potensi mitigasi yang diakui secara luas dan memiliki manfaat tambahan adaptasi. Walaupun potensi ekosistem pesisir ini besar, potensi untuk melepaskan emisi juga akan menjadi besar jika mangrove dan lamun mengalami degradasi. Stok karbon yang tersimpan pada biomassa ataupun sedimen akan terekspos udara dan kemudian selanjutnya proses mikrobiologi akan melepaskan gas rumah kaca ke kolom air atau atmosfer secara langsung. Kondisi ini cukup mengkhawatirkan mengingat konversi alih guna lahan menjadi lahan tambak masih cukup banyak terjadi di Indonesia.

b. Mitigasi dan Sosialisasi masyarakat terhadap perubahan iklim.

Mitigasi terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca menjadi isu utama dalam penelitian ini, namun ditekankan pula pentingnya memberdayakan masyarakat, komunitas, dan pemerintah untuk menangani perubahan-perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya di semua aspek masyarakat. Menggabungkan ilmu pengetahuan dengan pengetahuan lokal dan tradisional, menjadi kunci penting dalam memberikan bukti-bukti nyata terhadap kejadian perubahan iklim. Upaya-upaya adaptasi perubahan iklim sudah banyak dilakukan di Indonesia, terutama terkait dengan resiliensi masyarakat pesisir seperti nelayan, wisata bahari dan penggunaan solusi *hybrid* untuk perlindungan pantai. Upaya mitigasi, terutama apabila dikaitkan dengan pengertian bahwa mitigasi adalah aksi pengurangan emisi, masih berjalan lambat dan belum sepenuhnya diimplementasikan.

METODE PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, metode penelitian kualitatif ialah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. (Lexy Moleong, 1989). Metode Deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.⁷

b. Metode Pengumpulan Data

1. Studi Lapangan

Dalam memenuhi data dalam penelitian ini, maka studi lapangan akan dilakukan dengan melihat dan mengarsipkan secara langsung kejadian dan fenomena yang terjadi dilapangan, penelitian ini akan membantu beberapa kebijakan yang langsung diambil oleh pemerintah dalam menjawab rumusan masalah diatas

2. Metode Dokumentasi

Penelitian ini dilakukan dengan penelitian dokumentasi. Dokumen dimaksudkan unuk mendeskripsikan berbabagi realita yang diteliti. Data diperoleh melalui sumber data-data

⁷Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, akurat mengenai fakta-fakta yang terjadi. (Moh. Natsir, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta,1988, hal.63)

sekunder diperoleh melalui studi dokumenter, yakni melalui buku-buku, jurnal, artikel, undang-undang, berita dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan topik penelitian ini.

3. Wawancara

Penelitian ini akan melibatkan beberapa informan yang akan banyak memberikan informasi demi memenuhi identifikasi masalah yang ada dalam penelitian ini, beberapa informan diantaranya : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Organisasi Internasional seperti *Consevation International Indonesia* (CII) dan *Greenpeace*.

4. Metode Analisis Data

Analisa data dilakukan melalui interpretasi dari dokumentasi yang terkumpul, kemudian dianalisis secara deskriptif – kualitatif. Dengan mengadakan survei terhadap data yang telah ada peneliti menggali teori-teori yang telah berkembang dalam bidang ilmu yang berkepentingan. Untuk mengetahui validitas data informasi yang diperoleh diadakan Cross checking data tersebut menunjukkan adanya reliable data yang akan dianalisa.

I. RUMUSAN MASALAH

1. Apa sajakah upaya Indonesia dalam mengurangi emisi gas rumah kaca pasca 2020?
2. Sejauh mana dampak politik luar negeri Indonesia dalam menghadapi isu lingkungan yang terjadi saat ini?

II. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat sejauh mana peran Indonesia dalam mengurangi perubahan iklim dan pemanasan global yang terjadi. Komitmen global Indonesia dalam Perjanjian Paris: Ratifikasi Indonesia atas Perjanjian Paris melalui UU No. 16/2016 memperkuat negara untuk berkomitmen mengurangi emisi gas rumah kaca dan memerangi pemanasan global. Indonesia berjanji untuk memotong rumah kaca emisi gas sebesar 29% dengan APBN, dan naik 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Pada 2016, Indonesia ditetapkan. Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional (NDC) sebagai pengurangan 834 juta ton CO₂e atau 1.081 juta ton CO₂e dengan dukungan internasional pada tahun 2030.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan: Kesempatan Indonesia untuk bertindak dan mengimplementasikan agenda untuk berkontribusi secara signifikan untuk tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Pada tahun 2020, secara berkelanjutan mengelola, dan melindungi kelautan dan ekosistem pesisir untuk menghindari dampak merugikan yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya dan mengambil tindakan untuk itu pemulihan, untuk mencapai lautan yang sehat dan produktif.⁸

Tujuan keamanan Internasional, dengan menciptakan *Foreign Policy* pada hakekatnya akan banyak membahas tentang kepentingan nasional di panggung hubungan antar negara, kompleksitas hubungan tidak dapat dihindari. Kepentingan nasional memang diyakini bukan sebuah konsep yang tunggal dan bersifat obyektif (Roy,1998 dalam Harris 2005:4). Pada dasarnya setiap negara akan memilih kebijakan yang meningkatkan *power* dan *prestige* meskipun tidak selalu merupakan pilihan terbaik bagi pencapaian substansi yang sesungguhnya. Dalam lingkungan Internasional sejak berakhirnya perang dingin para pengambil kebijakan luar negeri menghadapi masalah *multiple responsibilities* yang sangat problematik. Mereka perlu banyak mempertimbangkan tanggung jawab mulai dari suara konstituen, kepentingan aliansi, dan isu kemanusiaan dalam spektrum yang luas terutama prinsip-prinsip keteraturan dalam hukum Internasional untuk mencapai kepentingan yang spesifik di luar negeri. Sehingga dalam kaitan ini kebijakan luar negeri menjadi instrumen ataupun sarana kepentingan yang saling tarik-menarik antara tuntutan internasional dan eksternal terhadap pemerintah.

1. Dokumen *Paris Agreement* Dan Konvensi Perubahan Iklim Periode 2015-2020.

Dalam penelitian ini akan banyak mengolah informasi dari beberapa persetujuan dan kesepakatan negara-negara yang menandatangani *Paris Agreement* dalam beberapa pertemuan mulai tahun 2015-2020. Selain itu meninjau kembali isi undang-undang kebijakan Indonesia dalam menjalankan proses pengurangan emisi gas efek rumah kaca dalam periode tersebut.

2. *Literatur Review*

Literatur review merupakan kerangka yang disusun untuk mengklasifikasikan sumber-sumber data dan informasi umum yang dikaji oleh penulis dalam penelitian. Tujuan dari *literatur review* itu sendiri adalah untuk mendapatkan pemahaman terkait permasalahan yang

⁸ Policy Brief No. 3 | November 2018 |Creating blue carbon opportunities in the maritime archipelago Indonesia.

dikaji, terutama tentang kebijakan luar negeri terhadap isu-isu global. Adapun beberapa pendekatan yang akan digunakan dalam proses pengambilan kebijakan luar negeri yaitu:⁹

a. Systemic Approach

Pendekatan ini adalah peran, identitas ataupun kepentingan yang diberikan negara oleh factor-faktor sistemik dari lingkungan Internasional, seperti: Konfigurasi kekuatan di tingkat global ataupun regional serta ide-ide hegemonik.

b. Societal Approach

Pendekatan ini terkait dengan preferensi aktor-aktor domestik, sehingga kebijakan luar negeri dipahami sebagai sebuah proses perjuangan yang berkelanjutan untuk memperebutkan pengaruh diantara tekanan-tekanan social domestik ataupun tekanan-tekanan politik dari berbagai kelompok-kelompok kepentingan yang ada dalam masyarakat.

c. State Centric Approach

Pendekatan ini melihat kebijakan luar negeri dibentuk dan dipertajam oleh struktur pemerintahan dan individu-individu serta institusi-institusi yang mensosialisasikan serta mengimplementasikan kebijakan (luar negeri) dimaksud atas nama (kepentingan) mereka. Karenanya tidak jarang bahwa kebijakan luar negeri seringkali dimanipulasi oleh preferensi-preferensi para politisi dan pejabat tertentu.

d. Ideas – Constructivism

Pendekatan ini percaya bahwa kekuatan dari peran ide atau gagasan akan mengarahkan suatu negara atau aktor untuk selalu menemukan cara-cara strategis baik unilateral ataupun multilateral yang dengan itu mereka dapat mencapai kepentingan/tujuannya.

a. Global environmental Regime

Kajian politik lingkungan global dimulai pada akhir 1960 an hingga awal 1970an. Kajian politik lingkungan hidup dimana akan menganalisa tentang peran negara, lembaga-lembaga internasional, ekonomi politik global, kekuasaan global, norma dan ideologi, dan teori-teori hubungan internasional.¹⁰ Beberapa ahli melihat inti dari kajian politik lingkungan ini adalah pada kajian literatur atas negara dan tata kelola global. Beberapa ahli yang lain melihat bahwasanya politik lingkungan hidup ini melekat pada teori hubungan internasional dari

⁹ Nurul Isnaeni & Broto Wardoyo, Isu Lingkungan Hidup Global: Tantangan Kebijakan Luar Negeri dan Negosiasi Multilateral. Jurnal Global Volume. 9. No. 2 Desember 2007 – Mei 2008.

¹⁰ Anna Yulia hartati. Global Environmental Regime: Di Tengah Perdebatan Paham Antroposentris Versus Ekosentris. Jurnal Ilmu Hubungan Internasional, SPEKTRUM Vol. 12, No. 2, Juli.2012.

rezim-rezim lingkungan. Ada juga yang beranggapan bahwa politik lingkungan hidup mempelajari dampak ekologi dari ekonomi global, seperti politik pertumbuhan, perdagangan, korporasi, finansial dan konsumsi. Meskipun banyak pendapat para ahli dan beragam riset yang menggunakan perspektif politik lingkungan hidup, Dauvergne menegaskan bahwa sumbangan dan kontribusi utama dari kajian politik lingkungan hidup ini adalah meluasnya area riset interdisipliner dalam politik dan lingkungan ini.¹¹ (Edited by Peter Dauvergne, 2005)

b. *Multilateral Diplomacy*

Diplomasi multilateral muncul sebagai sarana bagi negara-negara di dunia untuk bertindak bersama-sama menyelesaikan sebuah masalah bersama. Diplomasi multilateral memang bukanlah sesuatu yang baru, melainkan sudah muncul sekitar kira-kira abad ke-19. Munculnya Liga Bangsa-bangsa di awal abad ke-20 juga menandai upaya membangkitkan diplomasi multilateral sebagai wujud pencegahan terjadinya konflik bereskalasi yang sama, meskipun pada akhirnya bukan hanya negara-negara ini gagal mencapai kesepakatan tersebut satu persatu anggotanya justru mengundurkan diri karena alasan yang sangat pragmatis. Perserikatan Bangsa-bangsa yang lahir pada tahun 1945 menjadi contoh terbaik diplomasi multilateral ini, yaitu ketika negara-negara di dunia akhirnya berhasil mencapai titik temu mengenai formasi organisasi internasional yang bertujuan menjaga perdamaian dunia ini. Munculnya Majelis Umum PBB sebagai *the true global parliament* juga menjadi semangat bagi dunia untuk mencari kesepakatan bersama. Formalisasi diplomasi (dan diplomasi multilateral) di abad ke-20 ini turut didorong oleh kompleksitas hubungan internasional, yang kini tidak hanya merupakan hubungan politik dan keamanan saja, melainkan sudah bergerak kepada bidang-bidang lain seperti ekonomi, sosial kebudayaan, dan lingkungan. Maka apa yang bermula dari politik sebagai sarana mewujudkan eksistensi di forum internasional, kini menjadi wadah besar bersama untuk menyelesaikan masalah-masalah non-politis.

¹¹ Dalam Handbook of Global Environmental Politics (Edited by Peter Dauvergne, 2005, hal 8)

Teori multilateral diplomasi ini akan diimplementasikan sebagai bentuk Kerjasama negara-negara yang tergabung dalam konvensi perubahan iklim, negosiasi akan dilakukan untuk melakukan identifikasi kepentingan demi mencapai kesepakatan, untuk mendapatkan kesepakatan atas perbedaan kepentingan dan melakukan kompromi atau kombinasi

Tabel 3.1. Tahap-tahap negosiasi multilateral bidang lingkungan

TAHAP	KATEGORI			
	Insiden polusi (oleh ulah manusia)	Penemuan bukti-bukti ilmiah	Masalah eksploitasi berlebihan terhadap sumber-sumber biologis	Masalah ekonomi
Masukan				
Definisi masalah	Melalui diskusi rancangan konvensi	Di dalam kerangka agensi PBB	Pertemuan ilmiah	
Pernyataan posisi awal	(Dalam) pembukaan konferensi	(Dalam) pertemuan kelompok kerja yang disponsori oleh agensi PBB	(Dalam) pertemuan kelompok negosiasi khusus	
Perencanaan (<i>drafting</i>) / pembentukan formula	Negosiasi berdasarkan teks yang sudah disiapkan	Permulaan perancangan draf	Memilih draf yang akan digunakan sebagai dasar negosiasi	Merancang draf dalam komisi ad hoc
Tawar-menawar terakhir / detail	Negosiasi dalam sesi pleno	Negosiasi selama masa-masa akhir konferensi	Negosiasi selama sesi akhir INC	
Ratifikasi / implementasi	Kesepakatan dilaksanakan/diadakan pertemuan pihak-pihak yang terlibat (<i>Conference of parties</i> atau (oP)	Mekanisme pertemuan sementara	Negosiasi protokol atau amandemen	Kesepakatan tidak dilaksanakan

Pamela S. Chasek (2001) *Earth Negotiation: Analyzing Thirty Years of Environmental Diplomacy*. Tokyo and New York, The United Nations University Press, hal. 150

diantara pihak-pihak yang akan mewujudkan kesepakatan (Berridge,1995: 119).

Dalam negosiasi multilateral, Chasek membagi negosiasi dalam empat tahap, yaitu: diagnosis,formula,detail dan implementasi (Chasek, 2001: 45. Teori diharapkan dapat melengkapi jawaban-jawaban dari rumusan masalah diatas.

DAFTAR PUSTAKA

G.R. Berridge, *Diplomacy: Theory and Practice*.

Hemel Hempstead: Prentice Hall/ Harvester Wheatsheaf. 1995

Moh. Natsir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.

Peter Dauvergn, *Handbook of Global Environmental Politics*. 2005.

Pamela S. Chasek, *Earth Negotiations: Analyzing Thirty Years of Environmental Diplomacy*,
Tokyo: The United Nations University Press. 2001.

Paul G. Harris (Ed.), *Confronting Environment Change in East & Southeast Asia:
Eco-Politics, Foreign Policy, and Sustainable Development*, Tokyo: United Nations
University Press, 2005.

Trombetta, M.J. *Environmental Security and Climate Change:*

Analysing The Discourse, Cambridge Review of International Affairs, 21:4. 2008

Worku, Mogues. *The Missing Links: Poverty, Population, and the Environment in Ethiopia*.

Dalam *Environmental Change and Security Program (ed.) Focus on Population,
Environment, and Security*. Washington, DC: Woodrow Wilson International Center
for Scholars. 2007

JURNAL

Anna Yulia hartati. *Global Environmental Regime: Di Tengah Perdebatan Paham
Antroposentris Versus Ekosentris*. Jurnal Ilmu Hubungan Internasional, SPEKTRUM Vol. 12,
No. 2, Juli. 2012.

Nurul Isnaeni & Broto Wardoyo, *Isu Lingkungan Hidup Global: Tantangan Kebijakan Luar
Negeri dan Negosiasi Multilateral*. Jurnal Global Volume. 9. No. 2 Desember 2007 – Mei
2008.

Policy Brief No. 3 | November 2018 | Creating blue carbon opportunities in the maritime
archipelago Indonesia.

SUMBER LAIN

<https://www.rappler.com/world/kesepakatan-final-cop-21-di-paris>. Diunduh 13 Dec 2015,
Diakses 5 Nov 2020.

<http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K7-26-99d0d68ca9b94161bbdc07fc0a17cc37.pdf>

<https://kemlu.go.id/portal/id>. Diunduh 23 Januari 2014, Diakses 5 Nov 2020.

Kompas.com - 27/04/2020, 08:00 WIB di akses 5 Nov 2020

<https://www.mongabay.co.id/2020/04/13/isu-laut-dalam-konvensi-perubahan-iklim-dan-kesiapan-indonesia/> diakses 25 Oktober 2020.

Opini **Dr. Anastasia Rita Tisiana Dwi Kuswardani**, Peneliti Oseanografi Fisik di Badan Riset dan Sumber Daya Manusia, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam www.mongabay.co.id